

**CASCADING KINERJA TAHUN 2023-2026**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET																																																																																			
				2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026																																																																																
1	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mendapat penanganan	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	55,49	55,60	55,72	55,83	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mendapatkan penanganan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Orang	1310	1405	1490	1575	Terpenuhinya Kebutuhan Pemenuhan Per Orang Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	(disabilita s 130, anak terlanjar 10, usia terlanjar 350, gelandangan gan 19)	(disabilita s 140, anak terlanjar 15, usia terlanjar 355, gelandangan gan 19)	(disabilita s 150, anak terlanjar 20, usia terlanjar 360, gelandangan gan 19)	(disabilita s 160, anak terlanjar 30, usia terlanjar 370, gelandangan gan 10)	Terseadainya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	140 (disabilita s 20, anak terlanjar 30, usia terlanjar 20, gelandangan gan 30)	140 (disabilita s 25, anak terlanjar 30, usia terlanjar 20, gelandangan gan 30)	140 (disabilita s 30, anak terlanjar 35, usia terlanjar 20, gelandangan gan 35)	140 (disabilita s 35, anak terlanjar 40, usia terlanjar 25, gelandangan gan 35)	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185 (disabilita s 85, lanjut usia 100)	195 (disabilita s 95, lanjut usia 100)	205 (disabilita s 100, lanjut usia 105)	215 (disabilita s 110, lanjut usia 105)	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 (disabilita s 10, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)	40 (disabilita s 10, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 10)	50 (disabilita s 15, anak terlanjar 15, usia terlanjar 10, gelandangan gan 10)	60 (disabilita s 15, anak terlanjar 15, usia terlanjar 15, gelandangan gan 15)	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	305 (disabilita s 280, anak terlanjar 25)	325 (disabilita s 300, anak terlanjar 25)	330 (disabilita s 300, anak terlanjar 30)	335 (disabilita s 300, anak terlanjar 35)	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 (disabilita s 5, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)	40 (disabilita s 5, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 10)	50 (disabilita s 10, anak terlanjar 15, usia terlanjar 10, gelandangan gan 10)	60 (disabilita s 15, anak terlanjar 15, usia terlanjar 15, gelandangan gan 15)	Terpenuhinya Orang yang Membuatkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 (disabilita s 0, anak terlanjar 15, usia terlanjar 0, gelandangan gan 0)	15 (disabilita s 0, anak terlanjar 15, usia terlanjar 0, gelandangan gan 0)	15 (disabilita s 0, anak terlanjar 15, usia terlanjar 0, gelandangan gan 0)	15 (disabilita s 0, anak terlanjar 15, usia terlanjar 0, gelandangan gan 0)	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 (disabilita s 0, anak terlanjar 15, usia terlanjar 5, gelandangan gan 0)	25 (disabilita s 0, anak terlanjar 20, usia terlanjar 5, gelandangan gan 0)	30 (disabilita s 0, anak terlanjar 25, usia terlanjar 5, gelandangan gan 0)	35 (disabilita s 0, anak terlanjar 30, usia terlanjar 5, gelandangan gan 0)	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 (disabilita s 15, anak terlanjar 0)	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 (disabilita s 10, anak terlanjar ar 3, usia terlanjar ar 5, geland angan 2)	25 (disabilita s 10, anak terlanjar ar 3, usia terlanjar ar 5, geland angan 2)	25 (disabilita s 10, anak terlanjar ar 3, usia terlanjar ar 5, geland angan 2)	25 (disabilita s 10, anak terlanjar ar 3, usia terlanjar ar 5, geland angan 2)	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penuhuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penuhuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 (disabilita s 5, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)	30 (disabilita s 5, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)	35 (disabilita s 10, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)	35 (disabilita s 10, anak terlanjar 10, usia terlanjar 10, gelandangan gan 5)			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDUKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				SASARAN STRATEGIS	INDUKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET																										
																		Orang	60 (disabilitas < 40, anak terlarang 10, usia gelandangan 5)	70 (disabilitas < 45, anak terlarang 10, usia gelandangan 5)	75 (disabilitas < 45, anak terlarang 10, usia gelandangan 10)	80 (disabilitas < 45, anak terlarang 15, usia gelandangan 10)	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	5	5	10	10	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	10	10	15	15	Terperuhnya kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	10	15	20	25	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	10	15	20	25	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kab/kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kab/kota	Orang																			
																		Orang	10	15	20	25	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	15	15	20	20	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	10	10	15	15	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Dokumen	5	5	5	5	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rencanan dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen																			
																		Orang	300	300	300	300	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	Terperuhnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Orang	460	460	460	460	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				
																		Orang	100	100	100	100	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Unit	2	2	2	2	Tersedianya Tempat Punggsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Punggsian	Jumlah Tempat Punggsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit																			
																		Orang	30	30	30	30	Terperuhnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
																		Orang	30	30	30	30	Terperuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			





No	SARAN STRATEGIS	INDUKSI KEMERIA	SARAN	TARGET				SARAN SUB KEGIATAN	PROGRAM	INDUKSI KEMERIA	SATUAN	TARGET				SARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDUKSI KEMERIA	SATUAN	TARGET										
				2.35	2.35	2.35	2.35					%	100	100	100					100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan	Basis kekerasan terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	2.35	2.35	2.35	2.35	Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	Terpenuhi Jumlah layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar	Orang	12	12	12	12	Tersebutnya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	12	12	12	12
6	Meningkatkan Kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Prosentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengadilan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu	%	100	100	100	100	Terpenuhi Jumlah kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pada gahak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	Orang	40	40	40	40	Tersebutnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah Advokasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Perangkat Daerah	20	20	20	20
															Terpenuhi Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standar	Orang	43	43	43	43	Tersebutnya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	43	43	43	43	
7	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP	60.50	61.00	61.50	62.00	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	Terpenuhi Jumlah perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	17	17	17	17	Tersebutnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	12	12
8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Nilai Angka SKM	Nilai	82	82	82	82	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat							Terpenuhi Jumlah Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang terlayarkan	Bulan	12	12	12	12	Tersebutnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5	5	
															Terpenuhi Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Paket	14	14	14	14	Tersebutnya Jasa Pelayanan Kantor	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	
															Terpenuhi Jumlah pengadaan barang milik Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	Unit	10	12	12	12	Tersebutnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	-	-	-	
															Terpenuhi Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	Laporan	12	12	12	12	Tersebutnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	12	12	12	
															Terpenuhi Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	33	38	43	48	Tersebutnya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	13	13	13	13	
															Terpenuhi Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Bulan	12	12	12	12	Tersebutnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	
															Terpenuhi Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Paket	14	14	14	14	Tersebutnya Jasa Pelayanan Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	
															Terpenuhi Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	33	38	43	48	Tersebutnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	11	11	11	11	
															Terpenuhi Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan	Bulan	12	12	12	12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	7	7	7	

